

**PROSIDING
Rapat Kerja Teknis 2016**

**Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan**

**Tema : Gotong Royong
Meningkatkan Kualitas Air,
Udara dan Tutupan Lahan**

Jakarta, 21-24 Maret 2016



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya sehingga Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Tahun 2016 dapat diselenggarakan dengan lancar. Laporan ini disusun dengan tujuan: 1) sebagai catatan masukan dan koreksi bagi pelaksanaan kegiatan dari anggaran Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan (2) sebagai wujud kesepakatan dengan semua pihak dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Rapat Kerja Teknis ini dapat mempercepat dan menjalin kesepakatan dengan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui Rakernis ini Ditjen PPKL KLHK melakukan sinkronisasi kegiatan dan penyusunan rencana dengan Pemerintah Daerah, pihak swasta, akademisi, dan masyarakat.

Terima Kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara hingga tersusunnya Laporan Rakernis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2016. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi dan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, April 2016

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan

ttd

MR. Karliansyah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Gambar	3
Daftar Lampiran	4
Bab 1 Pendahuluan	5
Bab 2 Hasil Pelaksanaan	10
Bab 3 Kesimpulan	19
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pembukaan Rakernis oleh Sekjend KLHK dan Dirjen PPKL	10
Gambar 2. Pembukaan Rakernis PPKL oleh Sekjend KLHK dan Dirjen PPKL	11
Gambar 3. Peluncuran Website Dirjen PPKL KLHK	12
Gambar 4. Paparan dan Arahan Sekjend KLHK dan Dirjen PPKL	13
Gambar 5. Narasumber FGD Dekon PROPER 2016	14
Gambar 6. Pelaksanaan FGD DAK Gambut dan PKLAT 2017	15

DAFTAR LAMPIRAN

- Materi Presentasi sesi *Focus Group Discussion* (FGD)
- Foto kegiatan Rakernis PPKL 2016

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah: (1) menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 - 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42; (2) memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP; dan (3) melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) memiliki peran untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5 - 68,5 pada tahun 2019. Dalam upaya meningkatkan IKLH, Ditjen PPKL berupaya meningkatkan kualitas udara, kualitas air, kualitas tutupan lahan, menurunkan beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut, serta meningkatkan kualitas pengelolaan lahan gambut.

Tahun 2016 telah ditetapkan target untuk masing-masing indikator kinerja program yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU) 81,5; Indeks Kualitas Air (IKA) 52,5; Indeks Tutupan Lahan (ITL) 59,5; Persentase penurunan beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 5% dan luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat sebesar 150 Ha. Strategi pencapaian target pelaksanaan kegiatan tahun 2016 dapat dilakukan dengan membangun kerjasama yang erat dengan semua pihak.

Untuk itu, tema Rapat Kerja Teknis ini adalah **“Gotong Royong Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan”**. Gotong-royong diperlukan sebagai sebuah gerakan secara bersama-sama yang melibatkan semua orang untuk peduli dan aktif memelihara barang publik baik oleh pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat melalui gotong royong untuk air bersih, udara bersih bagi produktifitas rakyat. Diharapkan dengan sinergi antar seluruh *stakeholder* dapat mempercepat program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan agar dampaknya dapat cepat dirasakan masyarakat luas.

B. Tujuan

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan dari anggaran Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Terjalannya kesepakatan dengan semua pihak dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

C. Output

1. Rencana aksi pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016.
2. Kesepakatan dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan DAK Tahun 2016.

D. Waktu dan Tempat

Rakernis PPKL Tahun 2016 akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin-Rabu, 21-23 Maret 2016

Pukul : 08.30 - selesai

Tempat : Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

E. Peserta

Jumlah peserta rakernis diperkirakan sekitar 300 orang yang terdiri dari :

1. 102 orang dari institusi pengelola lingkungan hidup tingkat provinsi,
2. Kabupaten/Kota : 115 orang (DAS prioritas), 98 PKLAT, 45 PPU
3. 6 orang Pusat Ekoregion
4. 13 Direktorat JenderalXQ
5. 8 Staf Ahli dan Staf Khusus
6. Perusahaan
7. Perguruan Tinggi
8. K/L terkait seperti Kementerian Perhubungan, Keuangan, Perindustrian, PU, Pertanian dll.

F. Jadwal Acara

Agenda Acara
Rapat Kerja Teknis Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21 – 23 Maret 2016

NO	TIME		ACTIVITY	PIC	Ruang		
	From	To					
Hari ke-1, 21 Maret 2016							
1	14.00	18.00	Registrasi peserta dan Check in hotel	Panitia			
2	18.00	19:00	Makan Malam	Panitia	Restoran Kenanga		
3	19.00	19.05	Pembukaan	MC	Birawa		
4	19.05	19.15	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia	Birawa		
5	19.15	19.20	Pembacaan Doa	Panitia	Birawa		
6	19.20	19:30	Laporan Ketua Panitia	Sesditjen PPKL	Birawa		
7	19:30	19:50	Pembukaan dan Arahan	Menteri LHK	Birawa		
8	19.50	20:20	Launching Website PPKL	Tim Geospatial PPKL	Birawa		
9	20.20	20.40	Penandatanganan (MoU) dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi	Dirjen PPKL	Birawa		
10	20.40	21.00	Deklarasi Dunia Usaha mendukung penurunan beban pencemaran air	Dirjen PPKL	Birawa		
11	21.00	21:05	Penutup	MC	Birawa		
Hari ke-2, 22 Maret 2016							
Focus Group Discussion (FGD)							
	Hari kedua tanggal 22 Maret 2016		Ruang Birawa	Ruang Binakarna	Ruang Bima	PIC	
1	08:30	10:15	Evaluasi dan Mekanisme Dekon PROPER Sesditjen PPKL Dit. Evaluasi Kinerja B3 Peserta: 1. 32 Provinsi terkait PROPER	Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017: Pemulihan Kualitas Gambut, PKLAT. Dit. Gambut Dit. PKLAT Peserta: 1. Seluruh Provinsi 2. Seluruh Kab/Kota	Penyusunan rencana aksi bersama swasta: Penurunan beban pencemaran industri Dit. PPU Peserta: 1. Seluruh Perusahaan	Sekretariat Proper PKG, PKLAT, PPKPL, PPA	PPU dan PPA
2	10.15	10.30	Coffee break				
3	10.30	12.15	Lanjutan Penentuan Target Peserta PROPER dan Penandatanganan Berita Acara Peserta: 1. 32 Provinsi	Lanjutan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017: Pemulihan PPKPL, PPA Peserta: 1. Seluruh Provinsi 2. Seluruh Kab/Kota	Penyusunan rencana aksi bersama swasta: Penurunan beban pencemaran industri Dit. PPA Peserta: 1. Seluruh Perusahaan	Sekretariat Proper PKG, PKLAT, PPKPL, PPA	PPU dan PPA

			terkait PROPER					
4	12.15	13.30	ISHOMA					
5	13.30	15.00	Kriteria PROPER (Dit. PPA, Dit. PPU, Dit. PKLAT, Dit. PLB3) Peserta: 32 Provinsiterkait PROPER	Penyusunan rencana aksi - <i>Green Transportation</i> - <i>Inventarisasi Emisi Kabupaten/Kota</i> Peserta: 1. Seluruh Provinsi 2. Seluruh Kab/Kota	Penggalangan komitmen dunia usaha dan komunitas - Bersih-bersih sungai Dit. PPA Peserta: 1. Seluruh Perusahaan	Sekretariat PROPER	PPU	PPKPL PPA
6	15.00	15.30	Ashar, Coffee break, set up ruang Birawa					
7	15.30	16.15	Papararan Arah Kebijakan Pembangunan KLHK Seluruh Undangan			Sekjen LHK, Moderator: Dir. PKLAT		Birawa
8	16:15	17:00	Papararan Capaian 2015 dan Rencana Kerja Ditjen PPKL 2016 Seluruh Undangan			Dirjen PPKL, Moderator: Dir. PPA		Birawa
9	19:00	20:00	Makan Malam			Panitia		
Hari Ke-3, 23 Maret 2016								
1	08:30	10:30	Dekonsentrasi: Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Dit. PPU Peserta: 1. 34 Provinsi 2. 45 kota peserta EKUP	Pemulihan dan Coastal cleanup Pedoman Pemantauan Kualitas Air Laut dan Penetapan Titik Pemantauan Dit. PPKPL Peserta: 1. Seluruh Provinsi 2. Seluruh Kab/Kota selain di ruang Birawa dan Bima	Pengendalian kerusakan ekosistem gambut Dit. Gambut Peserta: 1. Seluruh Provinsi 2. Kab/Kota di Sumatera dan Kalimantan	PPU	PPKPL	PKG
2	10.30	10:45	Coffee Break			Panitia		
3	10:45	12:45	Lanjutan Dekonsentrasi: Passive sampler, Inventarisasi Emisi (IE) Peserta : 1. 34 Provinsi 2. 45 kota peserta EKUP	Lanjutan Rencana Dekonsentrasi 2017: Pemantauan perubahan tutupan lahan Dit. PKLAT Peserta: 1. Seluruh Provinsi		PPU	PKLAT	

				2. Seluruh Kab/Kota selain kota pelaksana EKUP				
4	12.45	13.45	ISHOMA					
5	13.45	15.30	Dekonsentrasi: Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Provinsi Dit. PPA Peserta: 1. 34 Provinsi	Penyusunan rencana aksi pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan Penyusunan DED Akses Terbuka Dit. PKLAT Peserta: 1. Seluruh Provinsi 2. Seluruh Kab/Kota		PPA	PKLAT	
6	15.30	16.00	Coffee Break					
7	16.00	17.30	Lanjutan Penetapan dan Rencana Aksi alokasi beban pencemaran air dan infrastruktur pembangunan Onlino Dit. PPA Peserta: 1. Seluruh Provinsi 2. Seluruh Kab.Kota selain pelaksana EKUP	Kegiatan Ditjen PPKL 2016: Pembangunan Infrastruktur Pemantauan 2016-2019 (AQMS) Dit.PPU Peserta: 1. Seluruh Provinsi 2. Seluruh Kota pelaksana EKUP		PPA	PPA	
8	17.30	19.30	ISHOMA			Panitia		
9	19.30	20.00	Penutupan: a. Pembacaan hasil kesimpulan b. Penutupan Rakenis oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			Panitia	Birawa	
Hari ke-4, 24 Maret 2016								
1	10.00		Check out			Panitia		

BAB 2

HASIL PELAKSANAAN

A. Pembukaan

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL) menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang bertema **“Gotong Royong Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan”**. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Maret 2016, bertempat di Hotel Bidakara- Jakarta yang dihadiri sekitar 300 orang yang berasal dari 34 Provinsi, 158 Kabupaten/Kota, 89 Para Pelaku Usaha, serta dari Perguruan Tinggi. Acara ini dibuka oleh Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekjen MenLHK) yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PPKL, Sigit Reliantoro selaku Ketua Panitia, Rakernis ini dilaksanakan untuk mensinergikan kegiatan di tahun 2016 dan 2017 serta percepatan kegiatan 2016 dengan penyusunan rencana aksi dan rencana kegiatan 2017. Selain itu disampaikan pula pentingnya dukungan dan komitmen perusahaan dalam penurunan beban pencemaran dan berpartisipasi dalam gerakan masyarakat untuk bersih sungai, bersih pantai, *eco-driving* dan gerakan-gerakan masyarakat lainnya. Sebanyak 19 topik yang akan dibicarakan dalam Rakernis ini. Tujuan Rakernis ini adalah untuk menjalin kesepakatan dengan semua pihak dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga target yang telah ditetapkan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat tercapai sebesar 64,5 - 65,00 pada tahun 2016 dan 66,5 - 68,5 pada tahun 2019.



Gambar 1. Pembukaan Rakernis oleh Sekjend KLHK dan Dirjen PPKL

Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan (MoU) Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan antara Dirjen PPKL dengan Gubernur Sumatera Selatan diwakili oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Ishak Mekki, Gubernur Jambi diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Ridham Priskap, Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala BLH Provinsi Kalimantan Tengah Mursid Marsono, Walikota Palembang Harnojoyo, Walikota Jambi Syarif Fasha, dan Walikota Palangkaraya Riban Satia. MoU antara Dirjen PPKL dengan Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, tentang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan Metode dan Peningkatan Kapasitas untuk Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Penandatanganan ini disaksikan oleh Sekjen KLHK.

MoU antara Dirjen PPKL dengan Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pembangunan dan pengembangan pusat data pemantauan kualitas udara provinsi dan pembangunan serta pengoperasian AQMS (*Air Quality Monitoring System*), sementara MoU antara Dirjen PPKL dengan Universitas Syiah Kuala mewakili perguruan tinggi untuk inventarisasi dan pemulihan ekosistem gambut dan akses terbuka serta program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Hidup lainnya.

Pada Kesempatan ini juga dilaksanakan pemberian Cenderamata berupa buku Renstra 2015 – 2019 Ditjen PPKL, Rencana Kerja 2016 dan Laporan Tahunan 2015 oleh Sekjen KLHK Kepada Gubernur/yang mewakili, Sekda, Kepala BLH, Walikota, serta Perguruan tinggi.



Gambar 2. Pembukaan Rakernis PPKL oleh Sekjend KLHK dan Dirjen PPKL

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mewakili MenLHK dalam arahannya menjelaskan bahwa Kondisi sungai-sungai di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Dari 610 titik pemantauan yang tersebar di 34 provinsi, indeks kualitas air di Indonesia relatif tidak berubah dari tahun 2011 sampai 2015 berkisar antara 51,82 - 54,18. Angka tersebut berarti kualitas air sungai mengkhawatirkan. Indeks tutupan lahan mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai 2015, dari 60,53 menjadi 58,55.

Penurunan ini diakibatkan pembukaan lahan dan kebakaran hutan di beberapa Provinsi.

Kekuatan lingkungan adalah jejaring yang kuat, oleh sebab itu jaringan Pemerintah Daerah, jaringan Dunia Usaha, perguruan tinggi, dan komunitas-komunitas masyarakat dipertemukan di Rakernis untuk membuat gerakan bersama memperbaiki lingkungan. Diharapkan dengan sinergi antar seluruh stakeholder ini mempercepat program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan agar dampaknya dapat cepat dirasakan masyarakat luas.

Pada rangkaian acara pembukaan Rakernis Ditjen PPKL, dilaksanakan pula peluncuran Website Ditjen PPKL, www.ppkl.menlhk.go.id sebagai media informasi yang bersifat pasif, namun diharapkan bisa bersifat dinamis, sehingga fungsi dan peran website menjadi dua arah dan timbul efek timbal balik. Peluncuran ini diresmikan oleh Dirjen PPKL disaksikan oleh Sekjend KLHK dan peserta dari BLH Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan terwujudnya website yang bersifat dinamis, diharapkan akan diperoleh aliran informasi yang optimal antara pemerintah-masyarakat dan sebaliknya, sehingga masyarakat akan terbangun rasa memiliki dan rasa kebutuhan akan website tersebut sebagai penyambung aspirasinya. Seiring dengan itu dengan adanya kemanfaatan website tersebut akan semakin meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.



Gambar 3. Peluncuran Website Dirjen PPKL KLHK

B. Focus Group Discussion

1. Arahan dan Paparan Sekjend KLHK dan Dirjen PPKL.

Perubahan Struktur organisasi KLHK telah mulai tahun 2014. Tahun 2016 merupakan masa transisi untuk konsep penganggaran yang baru di tahun 2017. KLHK telah melakukan penyusunan RKP 2017, dengan konsep yang berbeda. Kegiatan yang terkait dengan sektor lain ataupun dengan unit kinerja harus

diselaraskan dan disinergikan. Saat ini untuk perencanaan penganggaran KLHK menggunakan istilah “*money follow program*” yaitu perencanaan anggaran kegiatan akan diberikan berdasarkan program yang diajukan. Jumlah dan alokasi tergantung program yang akan direncanakan. Sebelumnya menggunakan paradigma “*money follow function*”. Kerangka perubahan strategi kebijakan pembangunan LHK harus terimplementasikan di daerah. Dalam strategi pembangunan nasional hal yang harus ditekankan adalah norma pokok pembangunan kabinet kerja (sesuai dengan nawa cita). Norma pokok tersebut terdiri dari 3 dimensi pembangunan: dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Kaitan norma pokok pembangunan dengan Ditjen PPKL adalah pembangunan/pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak serta menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem. Kondisi yang perlu dilakukan untuk mendukung dimensi pembangunan yaitu (1) kepastian dan penegakan hukum (sebagai bagian dari revolusi mental); (2) keamanan dan ketertiban; (3) politik dan demokrasi; serta (4) tata kelola dan reformasi birokrasi. Sasaran dan indikator diberikan penajaman sesuai konteks pada prioritas nasional. Hasil kesepakatan sasaran dan indikator kegiatan berasal dari multilateral dan bilateral *meeting*. Lokus kegiatan menjadi pengikat kinerja untuk mendorong sinergi yang berenergi.



Gambar 4. Paparan dan Arahan Sekjend KLHK dan Dirjen PPKL

Capaian program prioritas PPKL 2015 yaitu: (1) pengendalian Pencemaran Air terdapat 3 titik alat pemantau kualitas air di 2 DAS (ciliwung dan citarum); (2) pelaksanaan PROPER terdapat 2137 perusahaan dievaluasi dan diawasi kinerja pengelolaan lingkungan; (3) pengendalian kerusakan gambut yang berhasil dipulihkan yaitu seluas 173 Ha pemulihan kawasan gambut terdegradasi; dan (4) pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut berhasil memulihkan 10 kawasan ekosistem laut. Program dan kegiatan Ditjen PPKL yang terdapat di

program prioritas nasional yaitu (1) pembangunan kesehatan 2017 (30 IPAL komunal dan sarana sanitasi dasar umum); (2) pembangunan perumahan dan permukiman; (3) kemaritiman dan kelautan (pemulihan 40 kawasan prioritas, pembangunan IPAL); (4) kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) (pengembangan industri hijau dan PROPER); (5) pembangunan desa dan perdesaan (rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim); dan (6) pembangunan perkotaan (pembangunan kota hijau, green transportation, sistem informasi kualitas lingkungan perkotaan (AQMS dan ISPU *real time*)).

2. **Pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER tahun 2016 (Ruang Birawa)**

Telah disepakati jumlah peserta industri PROPER 2016 sebanyak 2224 industri dan meningkat sebesar 4% dari tahun 2015. Kriteria pelaksanaan PROPER masih mengacu PermenLH Nomor 3 Tahun 2014 dan pada tahun 2016 ditambahkan:

1. kriteria pengendalian kerusakan lahan gambut untuk sektor industri HTI dan perkebunan sawit yang berada di lahan gambut; dan
2. kriteria pemantauan kualitas udara ambient dan pemantauan kualitas badan Air sesuai dengan kewajiban dalam Dokumen Lingkungan.

Jadwal penguatan kapasitas dan sosialisasi sudah harus dilaksanakan pada tanggal 2-20 April 2016 oleh Provinsi dan Kunjungan lapangan pada tanggal 16 April - 16 Juni 2016.



Gambar 5. Narasumber FGD Dekon PROPER 2016

3. **Rencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 Dit. Pengelolaan Kerusakan Gambut dan Dit. Pemulihan Lahan Akses Terbuka (Ruang Binakarna)**

Tahapan pemulihan fisik lingkungan diatur dalam pedoman. DAK Pemulihan Kualitas Gambut dalam bentuk pembangunan sekat kanal, sedangkan DAK Pemulihan Lahan Akses Terbuka berupa pemulihan lokasi bekas tambang rakyat/liar yang telah ditinggalkan. Masing-masing memiliki kriteria dalam pelaksanaan di lapangan diantaranya berupa di luar kawasan hutan/konsesi perusahaan, memiliki desain pemulihan, memiliki peta luasan pada skala

tertentu, jaminan pasca pemulihan, diperkuat dengan pembentukan kelompok masyarakat, memiliki estetika lansekap dan kriteria lainnya yang telah ditentukan. Tujuan pemulihan diharapkan memiliki manfaat berupa perbaikan kerusakan ekosistem, pemanfaatan ekosistem sesuai peruntukan, dan peningkatan nilai ekonomi dari lahan yang dipulihkan.



Gambar 6. Pelaksanaan FGD DAK Gambut dan PKLAT 2017

4. **Rencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 Dit. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dan Dit. Pengendalian Pencemaran Air (Ruang Binakarna)**

Beberapa Pemerintah Provinsi berkeinginan dalam pengalokasian kegiatan pada DAK 2017 untuk menyediakan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik di lokasi pada penduduk dan akan mulai mencari lahan untuk pembangunan pengolahan air limbah serta mempersiapkan kelompok masyarakat binaan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Penyampaian proposal DAK 2017 kegiatan pengendalian pencemaran air dari Provinsi/Kabupaten/Kota ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KLHK dengan tembusan kepada Dirjen PPKL.

DAK Rehabilitasi Ekosistem Lamun dan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang tahun 2017. Untuk melaksanakannya harus memenuhi kriteria wajib dan kriteria tambahan. Target pemulihan sampai 2019 sebanyak 85 kawasan dan 50 buah IPAL.

5. **Penyusunan Rencana Aksi Bersama Swasta : Penurunan Beban Pencemaran Air (Ruang Bima)**

Pertemuan yang dilakukan dengan pihak industri ini bertujuan untuk menghimpun komitmen dari dunia usaha untuk menurunkan beban pencemaran air limbah yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Dalam

komitmen harus disampaikan perihal target penurunan beban, baseline data beban, strategi dan rencana aksi dalam mendukung program penurunan beban. 7 industri telah berkomitmen untuk menurunkan beban pencemaran air limbah yang dibuang ke lingkungan dengan berbagai metode dan telah menyampaikan target, baseline dan strategi yang dibutuhkan untuk mendukung program penurunan beban. Ketujuh industri tersebut adalah PT. Multimas Nabati Asahan – Kuala Tanjung dan Sinar Alam Permai - Kumai (Wilmar Group), PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2, PT. Ekamas Fortuna, PT. Indah Kiat Pulp and Paper – Tangerang Mills dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (Group Asia Pulp and Paper), serta PT. Perkebunan Nusantara VII PG Bungamayang.

6. Penyusunan Rencana Aksi Bersama Swasta: Penurunan Beban Pencemaran Emisi (Ruang Bima)

Kewajiban reduksi emisi bukan hanya kewajiban pemerintah melainkan juga dunia usaha, terutama industri dengan konsumsi energi lebih dari 60rb ton/tahun. Salah satu upaya penurunan beban emisi adalah melalui penerapan green boiler. Green boiler merupakan salah satu upaya efisiensi kinerja boiler melalui penggunaan bahan bakar berkalori tinggi/renewable dan penambahan peralatan dalam sistem boiler konvensional, misalnya dengan pengolahan air umpan boiler, peralatan pemanfaatan sisa panas (heat recovery) dan peralatan pengolahan gas buang untuk mengurangi emisi polutan. Green Boiler akan menjadi salah satu kriteria dalam penentuan industri hijau dalam PROPER. Selain itu juga dilakukan sosialisasi mengenai pelaporan emisi industri secara on line (<http://iku.menlhk.go.id/emisi-sektor-industri>) dimana akan di launching pada tahun 2017. Ke depan pelaporan emisi secara on line akan terkoneksi dengan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup lainnya (RKL-RPL, Air Limbah dan Limbah B3).

7. Peningkatan Kualitas Air Sungai Melalui Gotong Royong Pihak Pemerintah, Swasta, dan Komunitas Peduli Sungai (Ruang Bima)

Pertemuan yang dilakukan dengan pihak industry ini bertujuan untuk menghimpun komitmen dari dunia usaha untuk turut serta melakukan perbaikan kualitas air di sepanjang DAS prioritas, yaitu Ciliwung, Citarum, Cisadane dan Brantas. Kegiatan perbaikan kualitas air sungai diwujudkan dalam kegiatan bersih sungai, restorasi sungai, perbaikan sempadan sungai dengan penanaman bambu serta pengembangan wisata air. Pada tahun 2016, kegiatan ini akan dilaksanakan di Sungai Ciliwung pada tanggal 28 – 29 Mei 2016 atau bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup. Pertemuan ini berhasil menjaring komitmen dari beberapa perusahaan, yaitu PT. Freeport Indonesia, PT. Holcim Indonesia, PT. Frisian Flag, PT. Indolakto, PT. PJB untuk perbaikan kualitas air di sungai ciliwung. Di samping itu PT. Indonesia Power, PT. Pupuk Kujang dan Star

Energy, Ltd juga telah berkomitmen untuk mengikuti kegiatan serupa di Sungai Citarum, dan PT. Indah Kiat di Sungai Cisadane.

8. Pelaksanaan Dekonsentrasi Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Tahun 2016 (Ruang Birawa)

Tujuan kegiatan EKUP yaitu mengevaluasi kualitas udara kota-kota, dengan ruang lingkup kegiatan Uji Emisi (*spot check*), Roadside Monitoring, dan Traffic Counting dan Passive Sampler. Adapun beberapa perubahan pada pelaksanaan kegiatan EKUP Tahun 2016 adalah pemantauan kualitas BBM daerah diganti menjadi kegiatan passive sampler (rencananya akan berdiri sendiri), tidak ada Bintek dan Asisitensi EKUP tetapi Public Expose tetap dilaksanakan.

Informasi lain terkait pelaksanaan EKUP tahun 2016 diantaranya:

1. Tahun 2016 pelaksanaan EKUP dari 45 kota, sementara yang masih akan didampingan dari Staf KLHK hanya di 16 kota.
2. Untuk teknisi uji emisi tahun 2016 tidak lagi dari KLHK tetapi diserahkan sepenuhnya ke masing-masing BLH Propinsi dan sinkronisasi alat uji emisi dilakukan sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam juknis.
3. Saat ini KLHK bekerjasama dengan POLRI, agar hasil uji emisi menjadi prasyarat dalam perpanjangan STNK.

9. Pelaksanaan Dekonsentrasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien Metode *Passive Sampler* Tahun 2016 (Ruang Birawa)

- a. Sebanyak 22 Provinsi telah mengusulkan Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kualitas udara dengan metode *passive sampler* sebanyak 158 Kabupaten/Kota dari target 250 Kabupaten/Kota. Provinsi yang belum menyampaikan usulan Kabupaten/Kota yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.
- b. Untuk keperluan SK Dirjen PPKL tentang Penetapan Lokasi Pemantauan, maka usulan diterima paling lambat hari ini (23 Maret 2016).

10. Rencana pelaksanaan DAK Tahun 2017 *Coastal Cleanup* (Ruang Binakarna)

1. Peningkatan sampah di wilayah pesisir semakin menunjukkan perkembangan hampir disetiap wilayah,
2. Penanganan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pesisir dan laut tidak bisa hanya fokus pemantauan dan sampling dan kualitas hanya di laut saja melainkan juga harus dimulai dari inventarisasi dan penanganan pengendalian pencemaran dan kerusakan di hulunya mulai dari sungai dan kegiatan usaha,

3. KLHK perlu melibatkan banyak sektor karena isu lingkungan sangat besar. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pesisir dan laut perlu kerjasama dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat,
4. Perlunya informasi lingkungan hidup khususnya informasi pesisir dan laut secara komprehensif.

11. Rencana Dekonsentrasi Tahun 2017 Dit. PKLAT (Ruang Binakarna)

Pembahasan pertemuan sesi kali ini difokuskan pada pembahasan dekonsentrasi pemantauan perubahan tutupan lahan. Indeks tutupan lahan diharapkan mampu mencapai 62 pada tahun 2019 atau meningkat dari baseline 2014 senilai 59,1. Pada 2015 lalu, indeks tutupan lahan menurun di angka 58,55, penurunan tersebut disebabkan oleh kebakaran dan perubahan alih fungsi. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka merencanakan adanya dana dekonsentrasi di 2017 untuk membantu mencapai indeks tutupan lahan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Selain itu, program Menuju Indonesia Hijau akan dihidupkan kembali untuk mendukung peningkatan indeks tutupan lahan. Tujuan dekonsentrasi ini adalah untuk meningkatkan tutupan lahan dalam mendukung pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup sedangkan manfaat yang dihasilkan adalah untuk memperkuat desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan sumber daya alam dan sebagai instrumen bagi pemda dalam pelaksanaan pemantauan tutupan lahan. Terdapat sekitar 74.093 desa di seluruh Indonesia yang dapat didorong untuk melakukan gerakan menyeimbangkan fungsi lingkungan hidup karena desa tersebut sebagian memiliki lahan kritis dan sebagian lainnya berupa daerah berhutan. Data dan informasi yang diperlukan pada saat pemantauan tutupan lahan antara lain penggunaan data saat ini, penyebab penurunan kualitas lahan, dan potensi perubahan tutupan lahan. Verifikasi lapangan disesuaikan dengan RTRW Provinsi, peta alih fungsi hutan, perambahan, kebakaran, dan sebagainya. Strategi pelaksanaan adalah dengan inovasi dari bawah yaitu tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan nasional dengan cara : perhitungan indeks tutupan lahan, pemantauan tutupan lahan, peningkatan kapasitas pengelolaan tutupan lahan, penyusunan profil tutupan lahan, pengembangan model pembangunan desa hijau, bimbingan teknis dan replikasi desa hijau, dan monitoring dan evaluasi capaian pengelolaan tutupan lahan. Pengembangan konsep pemantauan tutupan lahan akan dicari solusi terbaik secara bersama agar diciptakan konsep pekerjaan dan pendanaan yang baik. Rumus perhitungan perubahan tutupan lahan pada tahun ini akan diintergrasikan dengan rumus yang sudah ada sebelumnya agar tidak menghasilkan deviasi yang terlalu jauh.

BAB 3

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2016

Telah disepakati jumlah peserta industri PROPER 2016 sebanyak 2224 industri dan meningkat sebesar 4% dari tahun 2015. Kriteria pelaksanaan PROPER masih mengacu PermenLH Nomor 3 Tahun 2014. Jadwal penguatan kapasitas dan sosialisasi sudah harus dilaksanakan pada tanggal 2 - 20 April 2016 oleh Provinsi dan Kunjungan lapangan pada tanggal 16 April - 16 Juni 2016.

2. Pengendalian Pencemaran Udara

Pembahasan upaya pengendalian pencemaran udara meliputi evaluasi pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP), Pemantauan Kualitas Udara Ambien metode *Passive Sampler*, serta peran swasta dalam menurunkan beban pencemaran udara (emisi). Tahun 2016 pelaksanaan EKUP dari 45 kota, sementara yang masih akan didampingi dari Staf KLHK hanya 16 kota menggunakan metode Uji Emisi (*spot check*), *Roadside Monitoring*, dan *Traffic Counting* dan *Passive Sampler*. Pada pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien, sebanyak 22 Provinsi telah mengusulkan Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kualitas udara dengan metode *passive sampler*, sebanyak 158 Kabupaten/Kota dari target 250 Kabupaten/Kota. Ke depan pelaporan emisi secara online akan terkoneksi dengan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup lainnya (RKL-RPL, Air Limbah dan Limbah B3).

3. Pengendalian Pencemaran Air

Pelaksanaan FGD Bidang Pengendalian Pencemaran Air membahas mengenai alokasi DAK, serta peranan swasta (industri) dan masyarakat. Beberapa Pemerintah Provinsi berkeinginan dalam pengalokasian kegiatan pada DAK 2017 untuk menyediakan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik di lokasi pada penduduk dan akan mulai mencari lahan untuk pembangunan pengolahan air limbah serta mempersiapkan kelompok masyarakat binaan. Pertemuan yang dilakukan dengan pihak industri bertujuan untuk menghimpun komitmen dari dunia usaha untuk turut serta melakukan perbaikan kualitas air. Sebanyak 7 (tujuh) industri telah berkomitmen untuk menurunkan beban pencemaran air limbah yang dibuang ke lingkungan. Sebanyak 5 (lima) perusahaan berkomitmen turut serta melakukan perbaikan kualitas air di sepanjang DAS prioritas, yaitu Ciliwung, Citarum, Cisadane dan Brantas. Sedangkan 4 (empat) perusahaan berkomitmen untuk mengikuti kegiatan serupa di Sungai Citarum, dan Sungai Cisadane.

4. **Pemulihan Lahan Akses Terbuka**

Pelaksanaan FGD Pemulihan Lahan Akses Terbuka meliputi pembahasan DAK yaitu untuk meningkatkan tutupan lahan dalam mendukung pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup. Alokasi kegiatan yaitu pemulihan lokasi bekas tambang rakyat/liar yang telah ditinggalkan. Masing-masing memiliki kriteria dalam pelaksanaan di lapangan. Indeks tutupan lahan diharapkan mampu mencapai 62 pada tahun 2019 atau meningkat dari baseline 2014 senilai 59,1. Program Menuju Indonesia Hijau akan dihidupkan kembali untuk mendukung peningkatan indeks tutupan lahan

5. **Pengendalian Kerusakan Gambut**

Pelaksanaan FGD terkait pengendalian kerusakan gambut membahas mengenai tahapan pemulihan fisik lingkungan diatur dalam pedoman. Pemulihan yang dilakukan merupakan pemulihan berupa fisik (perbaikan fisik lingkungan). Untuk pemulihan kualitas gambut, DAK yang ditawarkan/dialokasikan berupa pembangunan sekat kanal/*canal blocking*.

6. **Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut**

Pelaksanaan FGD bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut meliputi DAK Rehabilitasi Ekosistem Lamun dan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang tahun 2017. Untuk melaksanakannya harus memenuhi kriteria wajib dan kriteria tambahan. Target pemulihan sampai 2019 sebanyak 85 kawasan dan 50 buah IPAL.